

DAFTAR PUSTAKA

- Artika, I Gst Ngr Juni, 2015. Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 2011-2015).
- Arumdari, Rindang, 2019. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan*.
- Firdaus, 2020. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 2.
- Halim, Abdul 2015. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Andri, 2014. Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Kartika, D. dan Kusuma, I.C, 2015. Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal akunida*. Vol. 1 No. 2.
- Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahardika, I G. N. Suryaadi dan Artini, L.G. Sri, 2013. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Artikel Ilmiah Universitas Udayana*.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 1 No. 4.
- Nehen, 2012. *Perekonomian Indonesia*. Udayana University Press.
- Putri, Ika Nurhayati, 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

- Ramadhani, Febby Randria, 2016. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.14, No.01.
- Rosidin, Utang, 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. PUSTAKA SETIA Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-22. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widjaja, HAW, 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, Sony, 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zuhri, Muhammad dan Soleh, Ahmad, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*. Hal 187-195.